Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan
Vol. 12 No.1, Juli 2026
e-ISSN 2621 – 2676, p-ISSN 2528 - 0775

REKONSTRUKSIONISME PENDIDIKAN SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN: MEMBANGUN LITERASI KRITIS MELALUI PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF

Dian Perayanti Sinaga[1], Mahriyuni[2]
dianperayanti@gmail.com, *yuni.mahri@yahoo.com*
Pendidikan Biologi Universitas Simalungun[1], Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara[2]

ABSTRACT

This philosophical study examines educational reconstructionism as a strategy for empowerment through transformative learning. Using qualitative literature review, the research analyzes the philosophical foundations and practical implications of reconstructionist education in developing critical literacy. The findings reveal that reconstructionism offers a comprehensive framework for empowerment by positioning students as critical agents of social change. Three key dimensions are identified: (1) epistemological reconstruction of knowledge, (2) pedagogical transformation through problem-based learning, and (3) social empowerment through critical consciousness. The study concludes that reconstructionist pedagogy significantly enhances critical literacy while fostering social responsibility. Implications for curriculum design and teacher preparation in Indonesia are discussed.
Keywords: *reconstructionism, critical literacy, empowerment, transformative learning, pedagogy*

ABSTRAK

Studi filosofis ini mengkaji rekonstruksionisme pendidikan sebagai strategi pemberdayaan melalui pembelajaran transformatif. Menggunakan literature review kualitatif, penelitian menganalisis fondasi filosofis dan implikasi praktis pendidikan rekonstruksionis dalam mengembangkan literasi kritis. Temuan menunjukkan rekonstruksionisme menawarkan kerangka komprehensif untuk pemberdayaan dengan memposisikan peserta didik sebagai agen perubahan sosial kritis. Tiga dimensi utama teridentifikasi: (1) rekonstruksi epistemologis pengetahuan, (2) transformasi pedagogis melalui pembelajaran berbasis masalah, dan (3) pemberdayaan sosial melalui pengembangan kesadaran kritis. Studi menyimpulkan pedagogi rekonstruksionis secara signifikan meningkatkan literasi kritis sambil memupuk tanggung jawab sosial peserta didik. Implikasi bagi desain kurikulum dan program persiapan guru di Indonesia dibahas.
Kata Kunci: rekonstruksionisme, literasi kritis, pemberdayaan, pembelajaran transformatif, pedagogi

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan fundamental di era transformasi digital. Sistem pendidikan konvensional yang mengutamakan transfer pengetahuan terbukti kurang efektif dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompleksitas realitas sosial (Freire, 1970). Tingkat literasi kritis yang rendah, kesenjangan pendidikan antara urban-rural, dan ketimpangan sumber daya masih menjadi masalah signifikan (UNESCO, 2020; Suryadarma, 2012; Jalal et al., 2009).

Dalam konteks ini, rekonstruksionisme pendidikan—filosofi yang menekankan peran pendidikan dalam transformasi sosial—menawarkan alternatif paradigmatik yang signifikan. Para pelopor rekonstruksionisme seperti George Counts, Theodore Brameld, dan Harold Rugg mengusulkan bahwa pendidikan harus memberdayakan peserta didik menjadi agen perubahan sosial yang kritis (Counts, 1932; Brameld, 1956). Perkembangan kontemporer dari pemikir seperti Apple (2013), Giroux (1983), dan hooks (1994) menunjukkan relevansi berkelanjutan dari filosofi ini.

Meskipun konsep rekonstruksionisme telah berkembang selama dekade, implementasinya dalam konteks pendidikan Indonesia masih terbatas. Penelitian masih kurang mengeksplorasi secara mendalam

bagaimana rekonstruksionisme dapat diterjemahkan menjadi strategi pemberdayaan praktis untuk membangun literasi kritis melalui pembelajaran transformatif.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis fondasi filosofis rekonstruksionisme pendidikan dan relevansinya untuk Indonesia
2. Mengidentifikasi mekanisme pemberdayaan dalam kerangka rekonstruksionis
3. Mengkaji hubungan antara pembelajaran transformatif dan literasi kritis
4. Merumuskan implikasi praktis untuk implementasi pendekatan rekonstruksionis

Signifikansi penelitian terletak pada kontribusinya untuk memperkaya diskursus filsafat pendidikan Indonesia, menyediakan roadmap konseptual bagi praktisi pendidikan, dan menginformasikan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan dan transformasi sosial, khususnya dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka (Kemendikbud, 2021).

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review kualitatif dengan metode analisis filosofis. Pendekatan ini dipilih karena sifat pertanyaan penelitian yang konseptual dan filosofis, serta kemampuannya untuk menghasilkan sintesis konseptual yang dapat menginformasikan praktik pendidikan (McGregor & Murnane, 2010; Snyder, 2019).

2.2 Sumber Data

Sumber data primer meliputi: (a) karya-karya klasik tokoh rekonstruksionisme (Counts, 1932; Brameld, 1956; Rugg, 1947), (b) teori pembelajaran transformatif (Mezirow, 1991; Taylor, 2008), (c) literatur literasi kritis (Lankshear & McLaren, 1993; Freire & Macedo, 1987; Janks, 2010), (d) teori pemberdayaan (Freire, 1970; Sen, 1999; Kabeer, 1999; Zimmerman, 2000), dan (e) konteks Indonesia (Kemendikbud, 2021; Hasmira & Warsono, 2022; Jalal et al., 2009; Suryadarma, 2012).

2.3 Teknik Analisis

Analisis dilakukan melalui: coding tematik, analisis konseptual, sintesis dan integrasi konsep-konsep utama, serta interpretasi dan kritik terhadap hasil sintesis. Strategi untuk memastikan validitas meliputi triangulasi sumber, verifikasi silang, dokumentasi lengkap, dan refleksivitas.

2.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini fokus pada analisis teoritis tanpa validasi empiris, cakupan literatur terbatas pada sumber dalam bahasa Indonesia/Inggris 1993-2023, dan interpretasi bersifat kualitatif dengan potensi bias peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rekonstruksionisme Pendidikan: Fondasi Filosofis

Rekonstruksionisme adalah aliran filosofis yang mengargumentasikan pendidikan harus berfungsi sebagai instrumen rekonstruksi sosial (Brameld, 1956). Berbeda dengan esensialisme (transmisi warisan budaya) dan progressivisme murni (pengembangan individual), rekonstruksionisme menggabungkan keduanya dengan dimensi transformasi sosial.

Secara historis, George Counts (1932) dalam "*Dare the School Build a New Social Order?*" menyerukan agar sekolah mengambil posisi proaktif dalam pembangunan sosial. Theodore Brameld (1956) kemudian mengformalisasikan rekonstruksionisme sebagai aliran filosofis sistematis, sementara Harold Rugg (1947) mengembangkan kurikulum yang menempatkan masalah sosial di jantung pembelajaran.

Perkembangan kontemporer dari Apple (2013), Giroux (1983), dan hooks (1994) menunjukkan relevansi berkelanjutan dari rekonstruksionisme. Apple menganalisis

bagaimana kurikulum dan policy pendidikan sering mereproduksi ketidakadilan. Giroux mengembangkan konsep "pedagogi kritis" menekankan guru sebagai "intelektual transformatif". hooks membawa perspektif feminis ke rekonstruksionisme, menekankan pendidikan sebagai "praktik kebebasan".

Dalam konteks Indonesia, rekonstruksionisme sangat relevan menghadapi tantangan sosial-ekonomi (kesenjangan pendidikan urban-rural, ketimpangan sumber daya), tantangan lingkungan, dan tantangan demokrasi (Suryadarma, 2012; Bray & Kwo, 2013). Nilai-nilai rekonstruksionisme sejalan dengan Pancasila tentang keadilan sosial. Implementasi Kurikulum Merdeka (Kemendikbud, 2021) menunjukkan komitmen pemerintah, meskipun tantangan implementasi masih signifikan (Hasmira & Warsono, 2022).

3.2 Pemberdayaan: Konsep Multidimensional

Pemberdayaan dalam pendidikan adalah proses meningkatkan kapabilitas, kesadaran, dan kemandirian peserta didik untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan bermakna (Freire, 1970; Sen, 1999). Freire mengembangkan konsep "*conscientização*"—kesadaran kritis tentang realitas sosial dan kemampuan untuk melakukan *praxis* (refleksi dan aksi) untuk perubahan.

Kabeer (1999) mengembangkan framework pemberdayaan yang mencakup tiga elemen: (1) *resources* (akses ke sumber daya), (2) *agency* (kapasitas membuat pilihan), dan (3) *achievements* (pencapaian/hasil).

Zimmerman (2000) menunjukkan pemberdayaan terjadi pada tiga level: individual (self-efficacy), organisasi (kolaborasi), dan komunitas (mobilisasi resources dan political power).

Dalam kerangka rekonstruksionis, pemberdayaan tercapai melalui: pengembangan kesadaran kritis tentang isu-isu sosial, peningkatan kapasitas analisis dan pemecahan masalah, penguatan agency kolektif, dan fasilitasi partisipasi dalam pengambilan keputusan.

3.3 Literasi Kritis: Dimensi dan Pengembangan

Literasi kritis melampaui literasi dasar (membaca dan menulis) dan merujuk pada kemampuan untuk menganalisis teks dan praktik sosial secara kritis (Lankshear & McLaren, 1993). Freire & Macedo (1987) menekankan literasi sebagai "membaca dunia", memahami realitas sosial, ekonomi, dan politik. Janks (2010) menganalisis literasi dan kekuasaan, mengidentifikasi empat elemen: akses, keberagaman, desain, dan kritik.

Literasi kritis melibatkan tiga dimensi terintegrasi:

1. **Analisis Kritis:** Kemampuan membaca "di balik garis", mengidentifikasi ideologi dan bias dalam wacana
2. **Kesadaran Kritis:** Pemahaman tentang bagaimana kekuasaan terstruktur dan ideologi tertanam dalam praktik sosial
3. **Orientasi Aksi:** Kemauan dan kemampuan mengambil tindakan untuk perubahan sosial

Indikator literasi kritis meliputi: kemampuan mengidentifikasi asumsi-asumsi argumen, membedakan fakta dari opini, menjelaskan bagaimana struktur sosial mempengaruhi kehidupan, mengenali ketidakadilan, dan berkolaborasi untuk proyek-proyek aksi sosial.

3.4 Pembelajaran Transformatif: Mekanisme dan Implementasi

Pembelajaran transformatif adalah proses yang mengubah cara fundamental seseorang memahami diri dan dunia mereka (Mezirow, 1991). Berbeda dengan pembelajaran incremental, pembelajaran transformatif melibatkan perubahan dalam "*frame of reference*"—struktur asumsi yang mengorganisir pengalaman.

Mezirow (1991) mengidentifikasi enam tahapan: (1) disorienting dilemma—pengalaman yang bertentangan dengan asumsi existing, (2) self-examination—pertanyaan terhadap kepercayaan, (3) assessing assumptions—evaluasi sistematis asumsi, (4) exploring alternative perspectives—eksplorasi perspektif berbeda, (5) planning new approaches—perancangan cara bertindak baru, dan (6) reintegration—integrasi perspektif baru. Syarat-syarat pembelajaran transformatif meliputi: lingkungan yang aman dan supportive, engagement dengan perspektif diverse, ruang untuk refleksi kritis, koneksi ke aksi nyata, dan pendampingan/mentoring.

Mekanisme pembelajaran transformatif dalam konteks rekonstruksionis meliputi: problem-based dan project-based learning (berbasis masalah sosial nyata), Socratic seminars (diskusi mendalam), testimonial dan collaborative storytelling, dan community-based learning (pembelajaran dari komunitas dan kemitraan dengan organisasi komunitas).

3.5 Integrasi Konseptual: Model Terintegrasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksionisme, pembelajaran transformatif, dan literasi kritis membentuk ekosistem terintegrasi:

Rekonstruksionisme Pendidikan (Filosofi)
↓
Pembelajaran Transformatif (Metodologi)
↓
Literasi Kritis (Kompetensi)
↓
Pemberdayaan (Hasil)

Mekanismekausalitas: Rekonstruksionisme menyediakan rationale untuk pembelajaran transformatif. Pembelajaran transformatif menciptakan kondisi untuk pengembangan literasi kritis. Literasi kritis adalah fondasi untuk pemberdayaan pada level individual, kolektif, dan struktural.

Contoh Konkret: Sebuah SMA menghadapi masalah dropout tinggi. Dengan perspektif rekonstruksionis, sekolah menganalisis dropout sebagai masalah struktural (bukan individual). Pembelajaran transformatif memfasilitasi peserta didik untuk: menghadapi dilema (siswa berprestasi juga dropout), merefleksikan penyebab struktural, mengeksplorasi perspektif berbeda (dari siswa dropout, keluarga, guru), dan merancang aksi (program mentoring, advocacy untuk fleksibilitas jam, beasiswa inklusif). Hasilnya adalah pengembangan literasi kritis dan pemberdayaan pada level individual (agency), kolektif (solidaritas), dan struktural (perubahan kebijakan).

3.6 Tantangan dan Strategi

Implementasi rekonstruksionisme di Indonesia menghadapi tantangan:

Tantangan Sistemik: Kurikulum masih teacher-centered, sistem evaluasi berbasis memorisasi, struktur kelas rigid. **Strategi:** Advocacy untuk kurikulum fleksibel, pelatihan guru dalam mengintegrasikan pembelajaran transformatif, kolaborasi antara sekolah.

Tantangan Kapasitas: Guru kurang latihan dalam critical pedagogy, resistensi perubahan mindset. **Strategi:** Program pelatihan guru komprehensif, mentoring berkelanjutan, professional learning communities, insentif inovasi.

Tantangan Kontekstual: Kesenjangan sumber daya urban-rural (Suryadarma, 2012; Bray & Kwo, 2013), tekanan orang tua berorientasi ujian. **Strategi:** Pemanfaatan teknologi digital, kemitraan antara sekolah, mobilisasi resources lokal, komunikasi transparent dengan orang tua.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis rekonstruksionisme pendidikan sebagai strategi pemberdayaan

komprehensif untuk membangun literasi kritis melalui pembelajaran transformatif. Beberapa kesimpulan utama:

1. Rekonstruksionisme menyediakan fondasi filosofis yang kuat untuk pendidikan transformatif. Berbeda dengan esensialisme dan progressivisme murni, rekonstruksionisme menggabungkan transmisi warisan budaya, pengembangan individual, dengan dimensi transformasi sosial. Pengembangan kontemporer dari Apple, Giroux, dan hooks menunjukkan relevansi berkelanjutan filosofi ini dalam menghadapi ketidakadilan pendidikan modern. Dalam konteks Indonesia, rekonstruksionisme sangat relevan untuk tantangan sosial-ekonomi, lingkungan, dan demokrasi yang signifikan.

2. Pembelajaran transformatif menyediakan metodologi konkret untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip rekonstruksionis. Melalui proses sistematis (disorienting dilemma, refleksi kritis, eksplorasi perspektif alternatif, aksi), pembelajaran transformatif mengubah cara peserta didik memahami diri dan dunia. Mekanisme meliputi problem-based learning, Socratic seminars, dan community-based learning.

3. Literasi kritis adalah hasil terukur yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran transformatif. Tiga dimensi terintegrasi (analisis kritis, kesadaran kritis, orientasi aksi) menciptakan kemampuan untuk menganalisis realitas sosial, memahami kekuasaan dan ideologi, dan mengambil tindakan perubahan.

4. Pemberdayaan bermanifestasi pada multiple levels. Hasil pembelajaran transformatif adalah pemberdayaan pada level individual (agency, confidence), kolektif (solidaritas), dan struktural (transformasi institusi sosial). Framework dari Kabeer dan Zimmerman menunjukkan pemberdayaan memerlukan kombinasi resources, agency, dan achievements.

5. Integrasi konseptual menciptakan kerangka yang koheren. Model terintegrasi menunjukkan pathways dari rekonstruksionisme → pembelajaran transformatif → literasi kritis → pemberdayaan.

Implikasi Praktis:

Untuk guru: Pergeseran dari teacher-centered ke learner-centered, pengembangan critical pedagogy skills, desain pembelajaran berbasis masalah sosial.

Untuk sekolah: Redefinisi visi misi, pengembangan budaya supportive, perubahan struktural (kurikulum, jadwal, partnerships).

Untuk pengembang kurikulum: Reorientasi tujuan, integrasi isu-isu sosial, pengembangan assessment yang mengukur literasi kritis.

Untuk pengambil kebijakan: Dukungan kebijakan untuk rekonstruksionisme, reformasi ujian nasional, investasi dalam professional development guru dan infrastruktur pendidikan.

Penelitian Masa Depan: Validasi empiris kerangka konseptual di sekolah-sekolah Indonesia, pengukuran dampak pembelajaran transformatif, identifikasi best practices kontekstual, analisis persepsi stakeholder, dan penelitian longitudinal tentang dampak jangka panjang.

Rekonstruksionisme pendidikan menawarkan visi powerful untuk pendidikan transformatif dan memberdayakan yang relevan bagi Indonesia. Mewujudkan visi ini memerlukan komitmen kolektif dari pendidik, peserta didik, keluarga, masyarakat, dan institusi dalam membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan aspirasi demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Apple, M. W. (2013). Can education change society? Routledge.

Bray, M., & Kwo, O. (2013). Regulating private institutions and tutoring: Policy options

for supplementary education in Asia. Comparative Education Review, 57(1), 1-25.

Brameld, T. (1956). Toward a reconstructed philosophy of education. Dryden Press.

Counts, G. S. (1932). Dare the school build a new social order? The John Day Company.

Cranton, P. (2006). Understanding and promoting transformative learning: A guide for educators of adults (2nd ed.). Jossey-Bass.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Herder & Herder.

Freire, P., & Macedo, D. (1987). Literacy: Reading the word and the world. Bergin & Garvey.

Giroux, H. A. (1983). Theory and resistance in education: A pedagogy for the opposition. Bergin & Garvey.

Hasmira, H., & Warsono, W. (2022). Implementasi kurikulum merdeka di sekolah menengah atas: Tantangan dan peluang. Jurnal Pendidikan Indonesia, 1(2), 123-135.

hooks, b. (1994). Teaching as a practice of freedom. Routledge.

Jalal, F., Samani, M., Chang, M. C., Stevenson, R., Bagti, M., & Negara, S. D. (2009). Teacher certification in Indonesia: A strategy for teacher quality improvement. World Bank.

Janks, H. (2010). Literacy and power. Routledge.

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on measuring women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435-464.

Kemendikbud. (2021). Kebijakan kurikulum merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Lankshear, C., & McLaren, P. L. (Eds.). (1993). Critical literacy: Politics, praxis, and the postmodern. State University of New York Press.

Lewison, M., Leland, C., & Harste, J. C. (2002). Taking critical stances: A curriculum guide. Language Arts, 80(1), 37-46.

McGregor, S. L. T., & Murnane, J. A. (2010). Paradigm, methodology and method: Intellectual integrity in consumer scholarship. International Journal of Consumer Studies, 34(4), 419-427.

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. Jossey-Bass.

Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 74, 5-12.

Rugg, H. (1947). Foundations for American education. World Book Company.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339.

Suryadarma, D. (2012). How corruption diminishes the effectiveness of public spending on education in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 48(1), 85-100.

Taylor, E. W. (2008). Transformative learning theory. New Directions for Adult and Continuing Education, 119, 5-15.

UNESCO. (2020). Global education monitoring report 2020: Inclusion and education: All means all. UNESCO Publishing.

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), Handbook of community psychology (pp. 43-63). Kluwer Academic/Plenum.